

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH
KOTA DUMAI)**

Oleh:

Yuliana Dwi Jayanti

Pembimbing : Yusralaini dan Rusli

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : y_dwijayanti@yahoo.com

*Influence Of Good Governance, Financial Management Area and Financial
Accounting System Area To Local Government Performance
(Empirical Study On Government Dumai)*

ABSTRACT

*This study aimed to examine the effect caused by the variable good governance, financial management area and financial accounting system area of local government performance of local government in Dumai. This study uses a purposive sampling method with 70 respondents. Data collection techniques in this study is in the form of questionnaires, while data analysis technique used is multiple regression analysis were processed with SPSS version 17 for windows. From the results of the testing that has been done, simultaneous regression test (*F* test) showed that all independent variables studied have a simultaneous effect on the local government performance. Partial regression test (*t* test) showed that the variables good governance and financial accounting system area partially affect the variable local government performance, while the partial financial management area variables do not affect the variables local government performance. The magnitude of the effect caused by Adjusted R by three variables together against the dependent variable is 28,8%, while the remaining 71,2% is influenced by other variables not examined in this study.*

Keywords: good governance, financial management area, financial accounting system area, local government performance, and local government in Dumai

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi

babak baru terkait hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah ini memberikan wewenang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diterima pemerintah daerah salah satunya adalah menyusun sendiri

kebijakan daerah, yang ditujukan sepenuhnya untuk memberikan pelayanan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tuntutan masyarakat yang semakin kritis mengakibatkan pemerintah daerah harus menunjukkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik dan sebagai bentuk dari pelaksanaan APBD. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan berkualitas. Menurut Mardiasmo (2009) terdapat 3 fungsi utama organisasi sektor publik, yaitu (1) melakukan pelayanan kepada publik, (2) mendefinisikan prinsip operasional masyarakat, (3) menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta atau nirlaba yang ingin menanganinya.

Dalam konteks organisasi sektor publik, kinerja adalah suatu ukuran prestasi atau hasil dalam mengelola dan menjalankan suatu organisasi dimana berhubungan dengan segala hal yang akan, sedang dan telah dilakukan organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja pada pemerintah sangat penting dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengevaluasi kinerja periode yang lalu, agar dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan strategi pemerintah untuk periode berikutnya.

Pada praktek pelaksanaan pemerintah daerah masih banyak

terjadi permasalahan dan penyimpangan yang melibatkan oknum pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kota Dumai. Salah satu penyimpangan yang terjadi terdapat kelemahan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan. Terdapat beberapa dana dalam rekening kas daerah yang terindikasi digunakan untuk kegiatan yang bukan peruntukannya, diantaranya adalah dana reboisasi dan dana alokasi khusus.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, salah satunya adalah *good governance*. *Good governance* diartikan sebagai suatu proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi) di suatu negara atau daerah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam penggunaan segala sumber daya, baik alam, manusia dan keuangan, dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas publik dan hak-hak asasi manusia.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat agar dapat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab serta bebas KKN.

Apabila pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik,

sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan negara, tentu hal ini akan berdampak pada kinerja pemerintah yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan APBD yang baik didasari dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya sendiri, sesuai dengan kemampuan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Mardiasmo (2004) dalam Warsino (2009), peningkatan kinerja sektor publik merupakan hal yang bersifat komprehensif, dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai kemampuan dan rasa tanggung jawab yang mereka miliki.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana publik harus dilakukan dengan

sistem desentralisasi yang transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apabila keuangan daerah dikelola dengan baik, maka tujuan dan target pemerintah yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Pencapaian tujuan menjadi salah satu bukti yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik.

Faktor lainnya yang juga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Pengertian dari Sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi). Secara eksplisit, penggunaan informasi akuntansi bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan publik dilaksanakan para penyusun dan pelaksana program dan mentaati pencapaian tujuan dengan batasan tingkat pendanaan yang ditetapkan.

Sistem akuntansi keuangan daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sangatlah penting untuk menghindari adanya penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi. Oleh karena itu, para pengguna anggaran harus mengetahui dengan baik siklus pencatatan yang ada pada sistem akuntansi keuangan daerah yang menggambarkan setiap tahapan dalam proses yang dilakukan. Data

akuntansi yang dilaporkan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dikaitkan dengan data nonfinansial seperti data statistik memungkinkan instansi pemerintah untuk menilai efisiensi, sejauh mana sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara ekonomis dan penilaian efektivitas suatu instansi tersebut mampu memberikan pelayanan maksimum kepada masyarakat dengan sumber yang tersedia, termasuk menilai apakah hasil suatu program dapat mencapai konsekuensi-konsekuensi yang dituju.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah; 2) apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah; 3) apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh *good governance*, pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah.

TELAAH PUSTAKA

Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Rohman (2007) kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan

prestasi yang dapat dicapai pemerintah dalam periode tertentu.

Manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2009; 122) antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah sudah terpenuhi;
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

Good Governance

Definisi *good governance* menurut LAN dan BPKP dalam bukunya akuntabilitas dan *good governance* (2000:6), yaitu

penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Secara luas dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah suatu proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi) di suatu negara atau daerah dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam penggunaan segala sumber daya, baik alam, manusia dan keuangan, dengan cara yang sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas publik dan hak-hak asasi manusia.

United Nation Development Program (UNDP) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance* (Mardiasmo, 2004:24), yaitu:

1. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun di atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparancy*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berakitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat

diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. *Responsivness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stake holders.
5. *Concensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
6. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency dan effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat memiliki visi yang jauh ke depan.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa tujuan pokok dari penyusunan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah;
- b. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggungjawab, dan pasti;
- c. Mewujudkan sistem perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang mencerminkan pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mendukung otonomi daerah penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya, dan memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah yang bersangkutan;
- d. Menciptakan acuan dalam alokasi penerimaan negara dari daerah;
- e. Menjadikan pedoman pokok tentang keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah menurut Abdul Halim (2007:42) didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi).

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dan akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang andal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang.

Dalam Departemen Keuangan, tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem akuntansi pemerintah meliputi:

1. Perencanaan meliputi berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi permasalahan serta tujuan pengembangan akuntansi;
2. Pemilihan sistem, meliputi kegiatan studi kelayakan dari berbagai aspek atas berbagai sistem yang dapat digunakan untuk dipilih sistem yang tepat bagi pemerintah daerah yang bersangkutan;
3. Pengembangan sistem, meliputi kegiatan

pengembangan sistem dan prosedur akuntansi (berikut software), pengadaan hardware dan prasarana penunjang lainnya, penyiapan kelembagaan yang bertanggung jawab atas sistem akuntansi, penyiapan modul pelatihan, dan penyiapan SDM yang kompeten di bidang akuntansi;

4. Implementasi sistem, yaitu mengimplementasikan sistem yang telah dikembangkan. Dalam tahap implementasi ini hendaknya digunakan sistem paralel. Sistem keuangan daerah yang sekarang tetap berjalan sementara sistem akuntansi keuangan yang baru mulai dijalankan. Bila sistem yang baru berjalan lancar, maka sistem yang lama ditinggalkan;
5. Pemeliharaan sistem, dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ada serta untuk memutakhirkan agar sistem dapat selalu memenuhi kebutuhan. Pemeliharaan sistem ini harus dilaksanakan secara terus-menerus mengingat perubahan peraturan perundang-undangan, operasi dan transaksi keuangan pemerintah sedemikian sering terjadi.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah

Good governance merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan. Dalam melayani masyarakat, aparat pemerintah dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, yang dilihat dari tingkat pencapaian kinerja pemerintah. Tercapainya kinerja pemerintah yang baik bukan hanya ditentukan oleh banyaknya jumlah pegawai pemerintah melainkan juga karena faktor-faktor lain, salah satunya adalah pengelolaan dan pengendalian pemerintahan yang baik (*good governance*).

H₁: *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan dimana keuangan daerah harus dapat diatur dengan sebaik-baiknya agar semua hak dan kewajiban daerah dapat terpenuhi dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan daerah tersebut.

Apabila keuangan daerah tidak dikelola dengan baik maka rencana daerah yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula. Hal ini mengindikasikan terdapat kinerja yang baik pada suatu instansi atau organisasi.

H₂: Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 pasal 134 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perlu dirancang suatu sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. H₃: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Dumai yang berjumlah 33 SKPD. Penelitian ini hanya dilakukan di Dinas yang terdapat di lingkungan pemerintah Kota Dumai saja, yaitu sebanyak 14 Dinas. Responden dari penelitian ini adalah Kepala Dinas, Kasubag Keuangan, Kasubag Program, Bendahara dan Staf Keuangan di Dinas Kota Dumai yang berjumlah 70 orang.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu

organisasi (Chabib Soleh dan Surtanto, 2011:3). Indikator yang digunakan dalam variabel ini adalah: (1) Indikator Masukan, (2) Indikator Keluaran, (3) Indikator Hasil, (4) Indikator Manfaat, (5) Indikator Dampak. Pengukuran variabel ini menggunakan kuesioner dari Ade Indah Wahyuni, yang terdiri dari 12 pertanyaan dengan menggunakan skala *Likert*.

Good Governance (X₁)

Definisi *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam bukunya akuntabilitas dan *good governance* (2000:6), yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam variabel ini adalah: (1) Akuntabilitas, (2) Tanggung jawab, (3) Transparansi dan (4) Kewajaran. Pengukuran variabel ini menggunakan kuisisioner dari Ulfa Fimela, yang terdiri dari 13 pertanyaan dengan menggunakan skala *Likert*.

Pengelolaan Keuangan daerah (X₂)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas mengenai sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Indikator dalam variabel ini adalah: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan APBD, (3) Pelaporan, (4) Pertanggungjawaban dan (5) Pengawasan. Pengukuran variabel ini menggunakan kuisisioner dari Ade Indah, yang terdiri dari 11 pertanyaan dengan menggunakan skala *Likert*.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₃)

Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 Pasal 70 (1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum. Indikator yang digunakan dalam variabel ini adalah: (1) Pencatatan, (2) Penggolongan atau Pengklasifikasian, (3) Pelaporan. Pengukuran variabel ini menggunakan kuisisioner dari Ade Indah Wahyuni, yang terdiri dari 10 pertanyaan dengan menggunakan skala *Likert*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Kuisisioner disebarikan pada 14 Dinas di Kota Dumai secara langsung. Dari 70 kuisisioner yang disebarikan, kuisisioner yang kembali sebanyak 70 kuisisioner (100%) dan tidak ada kuisisioner yang tidak kembali dan seluruhnya dapat diolah.

Hasil Statistik Deskriptif

	N	Mini mum	Maxi mum	Mean	Std. Deviasi
Kinerja Pemerintah Daerah	70	33	55	45.34	4.615
Good Governance	70	43	64	55.21	4.949
Pengelolaan Keuangan Daerah	70	42	55	47.03	2.859
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	70	33	50	38.57	2.986
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai minimum variabel kinerja pemerintah daerah sebesar 33, nilai maksimum 55 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 45,34 dengan standar deviasi sebesar 4,615. Nilai rata-rata 45,34 menunjukkan bahwa besarnya kinerja pemerintah daerah sebesar 45,34. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi kinerja pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik

karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

Variabel *Good Governance* memperoleh nilai minimum sebesar 43, nilai maksimum 64 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 55,21 dengan standar deviasi sebesar 4,949. Nilai rata-rata 55,21 menunjukkan bahwa besarnya *Good Governance* adalah 55,21. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi *Good Governance* ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

Variabel pengelolaan keuangan daerah memperoleh nilai minimum sebesar 42, nilai maksimum 55 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 47,03 dengan standar deviasi sebesar 2,859. Nilai rata-rata 47,03 menunjukkan bahwa besarnya pengelolaan keuangan daerah adalah 47,03. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi pengelolaan keuangan daerah ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

Variabel sistem akuntansi keuangan daerah memperoleh nilai minimum sebesar 33, nilai maksimum 50 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 38,57 dengan standar deviasi sebesar 2,986. Nilai rata-rata 38,57 menunjukkan bahwa besarnya sistem akuntansi keuangan daerah adalah 38,57. Nilai rata-rata dan nilai standar deviasi sistem akuntansi keuangan daerah ini menunjukkan bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari pada standar deviasinya.

Dari data statistik deskriptif tersebut, dapat disimpulkan bahwa

secara keseluruhan nilai rata-rata variabel kinerja pemerintah daerah, *Good Governance*, pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah lebih besar dari pada standar deviasinya.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Dilihat dari uji validitas data didapatkan bahwa nilai r_{hitung} dari item pernyataan untuk semua variabel lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel *good governance*, pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja pemerintah adalah valid.

Hasil Uji Realibilitas

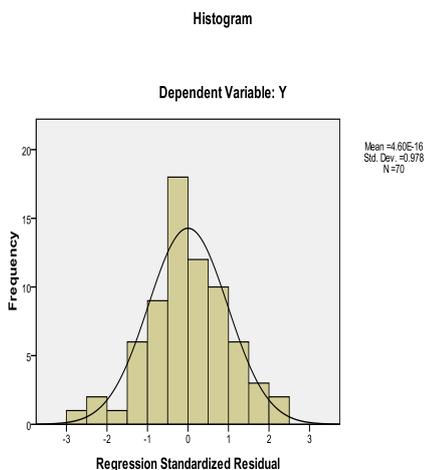
Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Jumlah Item Pertanyaan
Kinerja Pemerintah	0,712	12
<i>Good Governance</i>	0,741	13
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,693	11
Sistem Akuntansi keuangan Daerah	0,687	10

Sumber: Data Olahan

Dari hasil uji reliabilitas didapatkan hasil bahwa besarnya nilai *Cronbach Alpha* pada seluruh variabel baik variabel *good governance*, pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kinerja pemerintah lebih besar dari 0,60 sehingga dikatakan *reliable*.

Hasil Uji Asumsi Klasik Hasil Uji Normalitas Data

Dari hasil perhitungan model regresi, penelitian ini memenuhi asumsi normalitas. Cara untuk menguji normalitas data dengan melihat histogram, yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal seperti gambar berikut:



Data dikatakan berdistribusi normal apabila data menyebar didalam daerah outlier (-3 hingga +3). Dengan melihat tampilan grafik histogram diatas dapat dilihat bahwa tidak ada yang bersifat ekstrim atau berada diluar outlier dikarenakan data seluruhnya berada diantara -3 hingga +3. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan melihat grafik histogram dapat dikatakan data telah berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Selain itu dilakukan uji multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel independen. Hasil uji

multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Variabel	Collinearity Statistics		
	Tolerance	VIF	Keterangan
Good Governance	0,708	1,413	Tidak terdapat Multikolinieritas
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,727	1,376	Tidak terdapat Multikolinieritas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,712	1,405	Tidak terdapat Multikolinieritas

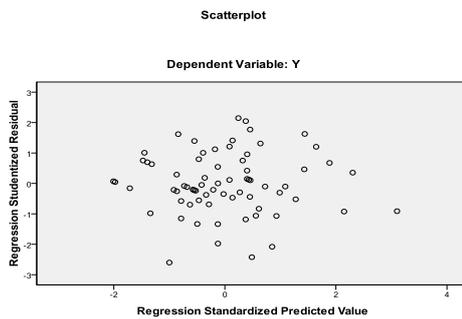
Sumber: Data Olahan

Dari hasil perhitungan analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel independen < 10 dan *tollerance* $> 0,10$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Selain itu juga dilakukan Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Berikut adalah

gambar hasil uji heteroskedastisitas:



Dari gambar *scatterplot* diatas terlihat bahwa titik-titik tersebar di sekitar nol pada sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak. Dengan demikian dari fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

H₁: Good Governance berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji regresi, variabel *Good Governance* mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 2,572 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,996 dan dengan nilai signifikansi 0,014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Good Governance* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,572 > 1,996$) dan dengan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel *Good Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Hal ini menunjukkan bahwa *good governance* yang tercipta dalam menjalankan roda pemerintahan dapat mempengaruhi dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Terselenggaranya

good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara (Budi Mulyawan, 2009). Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik KKN.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budi Mulyawan (2009) dan Iktria Susanti (2014) yang mengemukakan bahwa *good governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah. Hal ini menerangkan bahwa apabila *good governance* ditingkatkan maka kinerja dari pemerintah juga akan ikut meningkat.

H₂: Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Diketahui bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai nilai t_{hitung} sebesar -0,204 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,996 dan dengan nilai signifikansi 0,839. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,204 < 1,996$) dan dengan nilai signifikansi $0,839 > 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Dumai.

Kemungkinan ketidaksignifikan pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah disebabkan ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu adanya kebijakan dari Kepala Daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah tidak dikelola secara tertib, efektif, efisien dan juga kesulitan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah karena pemahaman pelaksana yang kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketetapan pemerintah belum tentu dapat menjamin bagus nya kinerja pemerintah suatu daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Nurul Arma (2012) yang mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Indah dan Alamanda Primadona (2012) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

H₃: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Diketahui bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 3,056 sedangkan t_{tabel} sebesar 1,996 dan dengan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,056 > 1,996$) dan dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain variabel Sistem Akuntansi Keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kota Dumai.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wawan, Lia (2009) dan Ade Indah (2012) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, maka menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara bersama-sama (simultan) variabel *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Dumai. Hubungan antar variabel *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Kinerja Pemerintah Daerah tergolong sedang dan kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen dalam

penelitian ini adalah sebesar 28,8% .

2. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Dumai. Artinya hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
3. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Dumai. Artinya hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak.
4. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

Keterbatasan

1. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari masing-masing responden sehingga jawaban responden belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di Dinas yang terdapat di lingkungan Kota Dumai saja, sehingga jawaban dari responden kurang variatif.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu *good governance*, pengelolaan keuangan daerah dan sistem

akuntansi keuangan sehingga kemungkinan ada variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan wawancara yang dapat membantu dalam mengendalikan jawaban tiap responden.
2. Untuk penelitian selanjutnya agar responden diperluas dengan melibatkan Kantor dan Badan sehingga mungkin saja hasilnya berbeda.
3. Selanjutnya, dikarenakan kemampuan variabel *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam menerangkan Kinerja pemerintah daerah hanya sebesar 28,8%, maka untuk penelitian selanjutnya, perlu meneliti variabel lain atau menambahkan variabel lainnya untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah sehingga dapat diketahui bagaimana menciptakan kinerja pemerintah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

- Mulyawan, Budi. 2009. *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi (Studi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Palembang)*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit LAN.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Primadona, Alamanda. 2012. *Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Rohman, Abdul. 2007. *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pemerintah Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Maksi Vol7 No.2
- Sekaran, Uma. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soleh, Chabib. Rohmansyah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Focus Media.
- Soleh, Chabib. Suropto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah*. Bandung: Focus Media.
- Sukmana, Wawan. Anggarsari, Lia. 2009. *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi FE Unsil, 4(1), 576-585.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wahyuni, Ade Indah. 2012. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung*. Skripsi. Universitas Komputer